

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang tinggi, salah satunya tercermin melalui batik yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2009. Selain memiliki nilai kultural, batik juga berperan strategis sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pekalongan yang dikenal sebagai salah satu sentra industri batik terbesar di Indonesia. Perkembangan industri batik di wilayah ini menunjukkan tren yang signifikan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah, terutama pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 29,66% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 (Risa Bella Rosanti, Arif Santsoso, 2024). Tingginya kontribusi ekonomi tersebut secara langsung berimplikasi terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor terkait. Untuk mengidentifikasi tingkat dominasi sektor industri pengolahan dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya, berikut disajikan data distribusi penduduk bekerja di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024:

**Tabel 1.1 Distribusi Penduduk Bekerja Kabupaten Pekalongan Menurut Sektor Utama Tahun 2024**

No.	Sektor / Lapangan Usaha	Persentase (%)
1.	Industri Pengolahan (Tekstil, Batik, dll)	29,66
2.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,98
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Motor	13,41

4.	Konstruksi	7,86
5.	Jasa Pendidikan	6,54
6.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,29
7.	Transportasi dan Pergudangan	3,13
8.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,91
9.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54
10.	Sektor Lainnya (Informasi, Komunikasi, Jasa Keuangan, dll)	12,68
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat jelas bahwa Sektor Industri Pengolahan memegang peranan paling dominan dalam struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan dengan persentase mencapai 29,66%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk bekerja di wilayah tersebut menggantungkan penghidupannya pada sektor industri, yang di dalamnya didominasi oleh industri tekstil dan batik. Tingginya angka penyerapan tenaga kerja ini selaras dengan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB yang telah disebutkan sebelumnya, mempertegas posisi Kabupaten Pekalongan sebagai pusat produksi batik yang padat karya. Besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan tersebut didorong oleh kuantitas unit usaha yang terus bertumbuh secara masif. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan, jumlah industri batik di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 telah menyentuh angka 669 unit usaha. Angka ini mencerminkan ekosistem industri yang sangat hidup, mulai dari skala UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) hingga industri skala besar yang tersebar di berbagai wilayah sentra seperti Buaran, Tirto, dan Kedungwuni.

Namun demikian, pesatnya perkembangan industri batik tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga memunculkan eksternalitas negatif berupa peningkatan pencemaran lingkungan, khususnya limbah cair hasil proses produksi. Proses pembuatan batik yang melibatkan penggunaan zat pewarna sintetis, bahan kimia pengikat, serta konsumsi air dalam jumlah besar berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk logam berat, serta bahan organik dengan kadar *Biological Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, dan *Total Suspended Solid (TSS)* yang tinggi. Limbah tersebut bersifat beracun dan sulit terurai secara alami, sehingga berisiko mencemari perairan dan merusak ekosistem. Di Kabupaten Pekalongan, produksi limbah batik mencapai volume besar dan berlangsung secara berkelanjutan, sehingga sungai sering dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir. Hal ini didukung oleh penelitian (Agustina et al., 2022) yang menyatakan bahwa sungai merupakan saluran utama pembuangan limbah industri batik, yang mengakibatkan tingkat pencemaran tinggi karena zat pewarna dan bahan kimia dari proses produksi.

Akibat tingginya volume limbah tersebut, kondisi sungai mengalami kerusakan yang jelas terlihat, terutama di Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran. Berdasarkan penelitian, Sungai Simbangkulon telah tercemar parah oleh limbah batik. Hasil pengukuran parameter kualitas air mengungkapkan bahwa tingkat pencemaran di Simbangkulon telah melampaui ambang batas baku mutu secara signifikan, dengan nilai TSS mencapai 829 mg/L ( $\pm 17$  kali di atas batas aman), BOD mencapai 341,3 mg/L ( $\pm 5,7$  kali di atas batas), serta

COD mencapai 498 mg/L (lebih dari 3 kali batas toleransi) (Hanzel, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa sungai tidak lagi berfungsi sebagai ekosistem alami, melainkan telah berubah menjadi saluran limbah industri. Selain itu, secara visual sungai mengalami perubahan warna menjadi coklat pekat hingga kehitaman serta menimbulkan bau menyengat akibat limbah produksi batik yang dibuang langsung ke aliran sungai (Pramesti & Hidayah, 2023).

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan fakta bahwa di Kelurahan Simbangkulon sebenarnya terdapat IPAL lain yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). IPAL tersebut merupakan fasilitas tambahan yang diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan daya tampung IPAL yang telah ada. Akan tetapi, hingga saat ini IPAL tersebut belum diresmikan dan belum dapat dioperasikan untuk pengelolaan limbah karena masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perencanaan dan implementasi kebijakan, di mana fasilitas yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan limbah yang ada.

Pemilihan Kabupaten Pekalongan sebagai lokasi penelitian didasari oleh sejumlah pertimbangan strategis. Pertama, daerah ini termasuk pusat utama industri batik di Indonesia dengan tingkat produksi tinggi yang memunculkan limbah dalam skala besar. Kedua, terdapat masalah pencemaran lingkungan yang konkret dan berlangsung terus-menerus akibat limbah batik. Ketiga, pemerintah daerah sudah memiliki regulasi serta kebijakan pengelolaan limbah,

yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Dalam perda tersebut ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan dan membuang air limbah industri wajib memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) guna mengolah air limbah agar memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Sehingga memungkinkan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Kabupaten Pekalongan menjadi tempat yang tepat untuk meneliti keterkaitan antara kebijakan publik dan isu lingkungan yang timbul dari kegiatan industri.

Secara lebih rinci, Kelurahan Simbangkulon dijadikan lokasi penelitian karena merupakan wilayah yang menjadi lokasi pembangunan IPAL komunal milik pemerintah, konsentrasi industri batik yang tinggi, serta tingkat kepadatan penduduk yang besar. Selain itu, terdapat indikasi peningkatan jumlah pelaku usaha batik yang cukup pesat sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah IKM Batik di Kelurahan Simbangkulon Tahun 2019 dan 2023**

No.	Sumber Data	Jumlah IKM (Unit)
1.	Data awal	27
2.	Data terbaru	76
	Kenaikan	49

Sumber: Diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel 1.2, terjadi peningkatan jumlah IKM batik yang signifikan di Desa Simbang Kulon. Peningkatan ini menunjukkan berkembangnya sektor industri batik di tingkat lokal, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan volume limbah yang dihasilkan apabila tidak

diimbangi dengan pengelolaan limbah yang optimal. Dari data BPS Kecamatan Buaran dalam Angka tahun 2024, Kelurahan Simbangkulon memiliki jumlah penduduk sebesar 9.834 jiwa dengan kepadatan mencapai 7.446 jiwa/km<sup>2</sup>. Selain itu, sebagian besar masyarakatnya bergantung pada industri batik, sehingga dampak pencemaran limbah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa limbah sisa produksi batik di Kelurahan Simbangkulon telah mencemari sumur warga, sehingga air sumur berwarna hitam kemerah-merahan dan tidak layak untuk dikonsumsi (Wibisono, 2022). Dampak dari pencemaran ini menimbulkan efek badan yang menjadi gatal-gatal. Puluhan warga Kelurahan Simbangkulon mengalami krisis air bersih yang mengharuskan mereka setiap hari membeli air kemasan galon dengan biaya Rp20.000,00 untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi, kurangnya jumlah dan kesadaran dari pengusaha batik terhadap pentingnya pengelolaan limbah batik membuat gagalnya kebijakan IPAL yang telah dibuat pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian tentang limbah batik di Pekalongan masih terpusat pada pengelolaan limbah secara teknis atau analisis kualitas air sungai. Penelitian yang membahas evaluasi kebijakan masih jarang dan cenderung bersifat umum, bukan pada skala lokal yang menjadi pusat masalah. Dengan begitu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang nyata, yakni belum ada kajian mendalam yang mengevaluasi pelaksanaan kebijakan IPAL di tingkat lokal, terutama di Kelurahan Simbangkulon sebagai daerah yang paling terdampak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat kesenjangan antara kebijakan dan kondisi lapangan, di mana regulasi serta fasilitas IPAL sudah ada namun pencemaran lingkungan tetap berlanjut. Karenanya, penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kebijakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk industri batik di Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, guna mengungkap sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) pada industri batik di Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam evaluasi pengelolaan air limbah pada industri batik di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam evaluasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Memperkuat konsep adanya kesenjangan antara policy output dan policy outcome dalam evaluasi kebijakan, yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan, tetapi juga oleh implementasi di lapangan
- b. Memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan publik, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, seperti kapasitas kelembagaan, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan, menambah wawasan, serta dapat digunakan sebagai sumber referensi atau daftar pustaka bagi peneliti selanjutnya

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Dapat memberikan masukan/saran atau rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengenai perbaikan kebijakan terkait pengelolaan air limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Pekalongan.
- b. Dapat menjadi pedoman bagi pengusaha batik dalam menerapkan praktik pengelolaan limbah yang lebih baik dan memenuhi standar lingkungan.

- c. Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Khasna, 2021, Evaluasi Kebijakan Pengolahan Air Limbah Batik di Kota Pekalongan (Khasna, 2021) didasarkan pada kondisi di Kota Pekalongan, yang dikenal sebagai sentra industri batik terbesar di Indonesia. Industri batik, yang mendominasi sektor ekonomi daerah, membawa dampak lingkungan yang serius akibat limbah yang dibuang langsung ke sungai. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan limbah melalui pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), baik secara komunal maupun skala rumah tangga, meskipun tantangan seperti biaya dan keterbatasan lahan tetap ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus evaluasi kebijakan berdasarkan empat indikator utama: *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*. Data diperoleh dari pemerintah, pelaku usaha batik, dan masyarakat melalui wawancara dan pengamatan. Metode pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan analisis data mengikuti model interaktif oleh Huberman dan Miles, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah batik di Pekalongan belum berhasil secara optimal. Beberapa hambatan yang diidentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dana, fasilitas IPAL yang belum mencukupi, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi pelaku industri dalam pengelolaan limbah. Meskipun pemerintah telah menyediakan IPAL komunal, daya tampungnya belum memadai untuk menampung seluruh limbah yang dihasilkan, sementara

pembangunan IPAL mini di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan karena keterbatasan fasilitas. Selain itu, belum adanya peraturan yang khusus mengatur pengelolaan limbah batik membuat kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif.

Penelitian (Nurhidayat, 2014) yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah Batik (Studi Kasus Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Kecil) menyatakan bahwa Kabupaten Pekalongan menghadapi tantangan besar terkait pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan kebijakan pengelolaan limbah melalui pengembangan IPAL, baik skala komunal maupun rumah tangga, sebagai upaya untuk meminimalisir pencemaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan IPAL di Kabupaten Pekalongan. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang relevan dengan fokus penelitian, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan literatur terkait. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan IPAL di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, sehingga belum sepenuhnya berhasil. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas IPAL yang memadai untuk menampung volume limbah yang dihasilkan oleh seluruh industri batik, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran pelaku industri batik terhadap pentingnya pengelolaan limbah sebelum dibuang. Selain itu, masalah teknis seperti

ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL komunal dan biaya pemeliharaan IPAL menjadi hambatan yang mempengaruhi keberlanjutan kebijakan ini.

Penelitian lain yang juga mengungkapkan kegagalan dari kebijakan IPAL di kemukakan oleh (Fajar et al., 2019) bahwa Kota Pekalongan, sebagai pusat industri batik di Indonesia, mengalami pencemaran sungai yang signifikan akibat limbah batik. Dengan mayoritas industri di wilayah ini tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Upaya pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi masalah ini mencakup pembangunan IPAL komunal di beberapa titik, namun efektivitasnya masih terbatas karena kapasitas IPAL tidak memadai untuk menangani seluruh limbah yang dihasilkan industri batik. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder, yang melibatkan teknik studi pustaka serta pengumpulan data dari instansi terkait. Metode komparatif diterapkan untuk menganalisis perbedaan kualitas air sungai sebelum dan sesudah penerapan IPAL, serta untuk menilai efektivitas sistem IPAL komunal. Temuan menunjukkan bahwa IPAL komunal saat ini belum mampu mengurangi pencemaran secara efektif, dengan kapasitas yang hanya dapat menampung sekitar 45% dari total limbah yang dihasilkan. Sungai-sungai di Pekalongan, termasuk Sungai Banger dan Sungai Brengi, masih menunjukkan peningkatan tingkat pencemaran. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan strategi pengelolaan IPAL dan penguatan kebijakan untuk memastikan pengurangan limbah yang lebih efektif serta mengurangi dampak lingkungan.

Namun, terdapat penelitian yang menyatakan keberhasilan dari kebijakan IPAL yaitu penelitian (Lutfiansyah, 2012) yang dilakukan di Kawasan Industri Kampung Batik Laweyan, Surakarta. IPAL dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, khususnya dari limbah industri batik yang berdampak negatif pada Sungai Jenes dan lingkungan sekitarnya. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta No. 2 Tahun 2006 yang bertujuan mengurangi pencemaran air oleh limbah industri skala kecil hingga besar di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dan validitas data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IPAL di Kampung Batik Laweyan efektif menurunkan pencemaran air hingga 70%, dengan biaya perawatan yang rendah namun hasil yang optimal. IPAL juga membawa manfaat dalam bentuk pengurangan pencemaran, lingkungan industri yang bersih, dan peningkatan citra kawasan. Masyarakat menunjukkan respons positif terhadap IPAL, meskipun terdapat hambatan awal dalam pemahaman antar pelaku industri dan masyarakat sekitar. Program ini dianggap berhasil memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian terkait kebijakan IPAL terhadap pengelolaan air limbah batik telah banyak dilakukan. (Khasna, 2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan belum maksimal, disebabkan oleh beberapa hambatan dan kurang adanya peraturan pemerintah yang kurang tegas. Tidak

hanya itu, Fajar *et al.* (2019) menunjukkan bahwa IPAL komunal di Kota Pekalongan saat ini belum mampu mengurangi pencemaran secara efektif, dengan kapasitas yang hanya dapat menampung sekitar 45% dari total limbah yang dihasilkan. Penelitian tersebut serupa dengan temuan (Nurhidayat, 2014) yang mengungkapkan bahwa kebijakan IPAL di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi tantangan yang signifikan sehingga kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil. Namun, penelitian dari (Lutfiansyah, 2012) menyatakan keberhasilan dari IPAL yang mengungkapkan bahwa implementasi IPAL di Kampung Batik Laweyan efektif menurunkan pencemaran air hingga 70%, dengan biaya perawatan yang rendah namun hasil yang optimal.

Penelitian terkait evaluasi kebijakan IPAL pada industri batik dengan studi kasus di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencemaran akibat limbah industri batik tersebut terjadi sebab belum optimalnya kebijakan pengelolaan air limbah serta menimbang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah pada industri batik di Kelurahan Simbangkulon.

## **1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1 Kebijakan Publik**

Definisi kebijakan publik yaitu segala tindakan pemerintah terkait dengan keputusan yang diambil. Baik keputusan-keputusan yang telah dan akan dibuat serta berdampak luas pada masyarakat. Sementara itu, hasil nyata dari kebijakan yang dijalankan pemerintah, baik dalam bentuk barang atau jasa

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, disebut pelayanan publik. Kebijakan publik dan pelayanan publik adalah dua aspek utama yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari fungsi esensial yang perlu dijalankan dalam pemerintahan (Handoyo et al., 2011:167).

Menurut Wilson (2006:154) yang dikutip dalam (Hayat, 2018:12) berpendapat bahwa kebijakan diartikan sebagai tindakan dan pernyataan dari pemerintah terhadap suatu permasalahan serta berbagai upaya yang dilakukan maupun tidak dilakukan untuk mengatasi, dan juga alasan atas apa yang terjadi maupun tidak terjadi. Selain itu, David Easton mengartikan kebijakan publik tidak hanya meliputi tentang hal yang dilakukan pemerintah, melainkan apa yang tidak serta keduanya harus memiliki alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan (Hayat, 2018:19). Sedangkan Thomas R. Dye (1992) yang dikutip oleh (Anggara, 2014:35) menyatakan "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*". Dye berpendapat jika pemerintah memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu maka terdapat tujuan yang melatarbelakanginya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas mengenai definsi kebijakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah kegiatan pemerintah yang dikerjakan ataupun tidak dikerjakan dalam menghadapi situasi tertentu sebagai upaya mencapai tujuan yang lebih luas.

Kebijakan publik (*public policy*) lahir karena tiga alasan utama: adanya tuntutan dari masyarakat, kepentingan elite penguasa, dan konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik berfungsi untuk

mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah mereka. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai: (1) tindakan atau ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak, (2) alasan pemerintah dalam memilih untuk bertindak atau tidak, dan (3) dampak dari tindakan atau ketidaktindakan pemerintah tersebut. Semua yang diputuskan atau diabaikan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan publik.

Menurut William N Dunn (2003) berpendapat bahwa terdapat lima tahap pembuatan kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap penyusunan agenda kebijakan publik tidak semua permasalahan langsung memperoleh perhatian. Ada beberapa isu yang sama sekali tidak diangkat, sementara Sebagian lainnya justru dijadikan prioritas utama. Selain itu, terdapat juga permasalahan yang pembahasannya ditunda untuk jangka waktu dan alasan tertentu sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam agenda kebijakan para pembuat keputusan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Setelah suatu isu masuk ke dalam agenda kebijakan, tahap berikutnya yaitu pembahasan oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan ini, berbagai aktor terlibat untuk menawarkan alternatif kebijakan untuk mengatasi isu. Proses ini mencakup pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Setiap alternatif kebijakan saling bersaing agar bisa dipilih dan dijadikan

sebagai kebijakan resmi untuk menyelesaikan masalah yang telah ditentukan.

### 3. Tahap Adopsi atau Legitimasi (*Legitimation*)

Sebuah alternatif kebijakan dapat diadopsi menjadi keputusan resmi apabila mendapat dukungan yang cukup kuat dari berbagai mayoritas anggota legislatif, kesepakatan di antara para pimpinan Lembaga, atau melalui keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan adanya dasar dukungan ini, sebuah kebijakan memiliki legitimasi yang jelas untuk dijalankan.

### 4. Tahap Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Kebijakan yang sudah ditentukan kemudian dijalankan oleh unit administrasi. Dalam pelaksanaannya, unit-unit ini menggerakkan dan mengatur sumber daya yang tersedia, baik berupa dana maupun tenaga manusia, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 5. Tahap Penilaian atau Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Pada tahapan ini, unit penilaian dan akuntansi dalam pemerintahan berperan penting untuk memastikan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif apakah sudah mematuhi ketentuan undang-undang pada proses penyusunan kebijakan serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan begitu proses kebijakan dapat berjalan transparan dan akuntabel.

### 1.6.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai suatu program atau kebijakan dengan tujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan dampaknya. Dalam konteks kebijakan evaluasi dapat diartikan sebagai monitoring keberlanjutan dari kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan (Hajaroh et al., n.d.). Selain itu, evaluasi kebijakan juga digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai hasil akhir suatu kebijakan, tetapi juga penting dalam setiap tahap proses kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi.

Evaluasi kebijakan mempunyai beberapa definisi dari sebagian pakar diantaranya menurut (Anderson, 2003), evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai kegiatan yang melibatkan penilaian atau pengujian terhadap sebuah kebijakan, termasuk aspek isi, implementasi, dan dampaknya. Kegiatan ini bersifat fungsional, artinya evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir proses, tetapi sepanjang seluruh siklus kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi mencakup perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut, implementasi, serta penilaian dampak kebijakan. Menurut Anderson, evaluasi kebijakan memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, kegiatan evaluasi harus dilakukan di setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga penilaian dampak kebijakan. Dalam konteks ini, evaluasi sering kali berfungsi sebagai

proses penilaian yang sistematis dengan menggunakan standar atau kriteria tertentu. Oleh karena itu, melalui evaluasi, kita dapat memperoleh hasil dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Pendapat lain terkait pengertian evaluasi menurut William Dunn yang dikutip dalam (Akbar dan Widya, 2018:14) bahwa secara umum evaluasi dapat diartikan sebagai proses penaksiran, pemberian nilai, atau penilaian. Secara khusus, evaluasi berhubungan dengan penyediaan informasi mengenai nilai atau manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil dari pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap hasil kebijakan tersebut, baik dari segi pelaksanaan maupun manfaatnya, yang kemudian digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk kebijakan berikutnya. Terdapat tiga jenis pendekatan evaluasi kebijakan menurut William Dunn (2003) yaitu:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, namun tanpa menilai manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Evaluasi ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan tanpa melakukan analisis menyeluruh tentang keuntungan atau dampak kebijakan tersebut terhadap

penerimanya atau masyarakat luas. Dengan kata lain, evaluasi semu hanya melihat hasil secara administratif atau teknis, seperti apakah target kebijakan tercapai, berapa banyak sumber daya yang digunakan, atau bagaimana prosedur kebijakan dijalankan.

## 2. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid mengenai hasil kebijakan, dengan berpatokan pada tujuan program kebijakan yang telah ditetapkan secara resmi oleh para pembuat kebijakan. Dalam evaluasi formal, pengumpulan data dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Fokus utamanya adalah pada capaian yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan secara jelas dan resmi. Evaluasi formal memiliki beberapa jenis utama, salah satunya evaluasi kepatuhan. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan kebijakan atau program berlangsung. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan umpan balik yang bisa digunakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini sering dilakukan pada tahap awal atau tengah implementasi kebijakan sehingga perbaikan dapat segera dilakukan jika diperlukan. Selain itu, terdapat evaluasi sumatif yang digunakan sebagai penilaian hasil akhir dari kebijakan atau program dan juga membantu dalam memahami tingkat efektivitas dan efisiensi dari kebijakan.

### 3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis yaitu pendekatan evaluasi yang memakai metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara jelas diharapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara objektif bagaimana kebijakan diterapkan dan apa saja hasil yang dicapai, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang terpercaya dan valid bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.

Dalam evaluasi ini, fokus utama adalah memastikan bahwa hasil-hasil kebijakan memenuhi ekspektasi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan. *Stakeholders* yang mungkin termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak terkait lainnya—mempunyai harapan tertentu terhadap kebijakan yang diterapkan. Melalui evaluasi ini, informasi yang dihasilkan tidak hanya menunjukkan hasil kebijakan secara kuantitatif, seperti jumlah penerima manfaat atau tingkat keberhasilan, tetapi juga secara kualitatif, termasuk dampak nyata dari kebijakan tersebut.

Sebagai perbandingan dengan teori lain yaitu dari James P. Lester dan Joseph Steward Jr. yang dikutip dalam (Akbar dan Widya, 2018:16-17) evaluasi implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi beberapa jenis: evaluasi proses, yang berfokus pada tahapan pelaksanaan kebijakan;

evaluasi dampak, yang berkaitan dengan hasil atau efek dari penerapan kebijakan; evaluasi kebijakan, yang menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan; serta metaevaluasi, yaitu evaluasi terhadap berbagai pelaksanaan kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi kesamaan-kesamaan tertentu.

Pendekatan evaluasi formal adalah pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai kerangka penelitian ini dengan landasan bahwa evaluasi formal dapat mengevaluasi kebijakan secara lebih terperinci serta melibatkan analisis tujuan, proses, serta dampaknya menggunakan kriteria yang jelas seperti efektivitas, efisiensi, dan relevansi. Pendekatan ini juga membantu memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada data dan analisis yang terukur.

Secara umum, William N. Dunn menjelaskan bahwa terdapat enam kriteria utama dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, penulis akan menguraikan masing-masing indikator tersebut beserta relevansinya dengan tujuan evaluasi kebijakan serta keterkaitannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah sebagai berikut:

1. Efektivitas dipilih sebagai salah satu indikator utama sebab berfungsi sebagai tolak ukur sejauh mana kebijakan pengelolaan air limbah yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mampu mencapai tujuan

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014. Tujuan utama dari Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), adalah untuk mengatur dan mengendalikan pembuangan air limbah, melestarikan serta menjaga kualitas air tanah dan air permukaan, memastikan air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu, serta memperkuat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Oleh karena itu, indikator efektivitas sangat relevan digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Perda ini mampu menekan tingkat pencemaran air sekaligus meningkatkan kualitas air di Kabupaten Pekalongan. Efektivitas dapat dilihat dari hasil nyata di lapangan, seperti optimalnya fungsi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar baku mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 17, serta berkurangnya pelanggaran atau kasus pencemaran lingkungan yang bersumber dari pembuangan limbah cair.

2. Efisiensi digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa optimal sumber daya (waktu, tenaga, dan biaya) yang telah digunakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah. Dalam konteks Perda No. 5 Tahun 2014, efisiensi tercermin dalam Pasal 5, yang menegaskan bahwa pengelolaan air limbah dilaksanakan secara terpadu dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Efisiensi dapat dilihat dari bagaimana pemerintah memanfaatkan sarana seperti IPAL setempat dan terpusat (Pasal 6-11) sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga penggunaan anggaran dan tenaga teknis menjadi lebih efektif. Semakin kecil biaya yang

dikeluarkan untuk mencapai dampak lingkungan yang besar, maka semakin efisien kebijakan tersebut diterapkan.

3. Kecukupan digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana kebijakan dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 mampu menjawab permasalahan lingkungan, khususnya pencemaran air di Kabupaten Pekalongan. Ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 17 mengatur kewajiban setiap pelaku usaha dan kegiatan industri untuk memiliki IPAL, memasang alat pemantau kualitas air, serta memastikan hasil olahan limbah memenuhi baku mutu. Selain itu, Pasal 36 hingga Pasal 38 mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Perda ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki instrumen penegakan hukum yang cukup untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan air limbah. Dengan demikian, kecukupan dapat diukur melalui sejauh mana perda ini mampu mengatasi permasalahan lingkungan secara nyata dan berkelanjutan.
4. Perataan yaitu indikator yang meninjau sejauh mana kebijakan memberikan manfaat secara merata kepada semua pihak yang berkepentingan. Indikator perataan juga sangat berkaitan dengan substansi Perda No. 5 Tahun 2014, terutama Pasal 23 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh kualitas air yang baik serta berpartisipasi dalam pengendalian pencemaran air. Selain itu, Pasal 31 dan Pasal 32 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan kepada masyarakat serta pelaku usaha kecil agar dapat melaksanakan pengelolaan

air limbah dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perda ini berupaya menciptakan keadilan lingkungan, di mana manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan oleh kalangan industri besar tetapi juga oleh masyarakat kecil di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

5. Responsivitas yaitu indikator yang mencerminkan kemampuan kebijakan untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam Perda No. 5 Tahun 2014, responsivitas tercermin melalui ketentuan Pasal 30 sampai Pasal 32 yang mengatur pembinaan, penyuluhan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pelatihan, penyebaran informasi, dan forum konsultasi teknis guna memperkuat partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan air limbah di Pekalongan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin responsif pula kebijakan tersebut terhadap kebutuhan nyata di lapangan.
6. Ketepatan dipilih sebagai indikator yang digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah. Perda No. 5 Tahun 2014 disusun berdasarkan realitas Kabupaten Pekalongan yang memiliki banyak aktivitas industri batik dan permukiman padat penduduk yang berpotensi menghasilkan limbah cair tinggi. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 tentang ruang lingkup pengaturan air limbah domestik dan industri serta Pasal 6 sampai Pasal 8 mengenai sistem

pengelolaan setempat dan terpusat. Selain itu, Pasal 31 yang menekankan pembinaan terhadap usaha kecil menunjukkan bahwa perda ini disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikatakan tepat karena selaras dengan kebutuhan dan permasalahan spesifik daerah Pekalongan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keenam indikator evaluasi kebijakan menurut William N Dunn memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah. Setiap indikator memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menilai keberhasilan kebijakan, mulai dari pencapaian tujuan (efektivitas), pemanfaatan sumber daya (efisiensi), kemampuan kebijakan mengatasi masalah lingkungan (kecukupan), pemerataan manfaat bagi masyarakat (perataan), ketanggapan terhadap kebutuhan publik (responsivitas), hingga kesesuaian dengan kondisi lokal (ketepatan). Dengan menggunakan keenam kriteria tersebut, evaluasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana implementasi Perda No. 5 Tahun 2014 telah berlangsung secara efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

### 1.7 Operasional Konsep

Penelitian evaluasi kebijakan pengelolaan IPAL ini bertujuan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan pengelolaan air limbah dengan fokus limbah batik yang dilaksanakan di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn, dengan 6 kriteria dalam evaluasi kebijakan diantaranya yaitu:

**Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep**

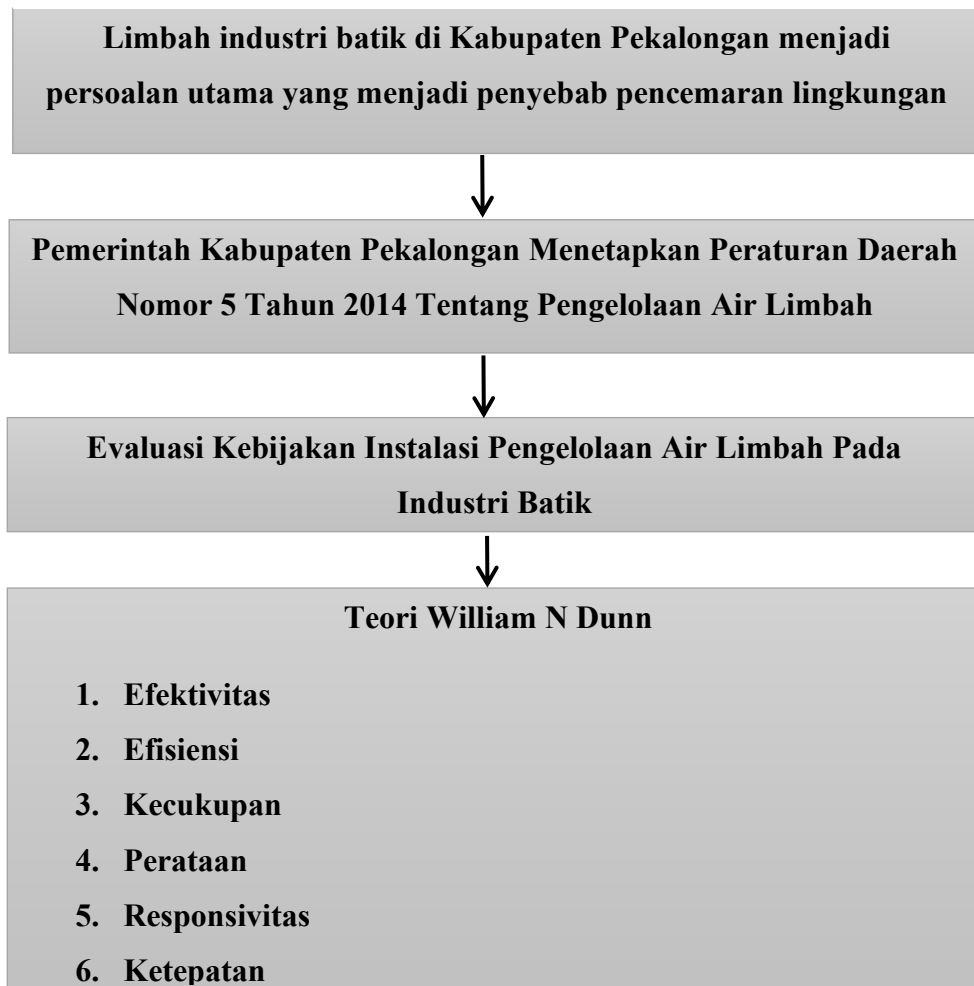
<b>Kriteria Evaluasi</b>	<b>Indikator Penilaian</b>	<b>Indikator Pertanyaan Penelitian</b>
Efektivitas	Menganalisis kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan	a. Bagaimana pemerintah Kelurahan Simbangkulon menilai efektivitas kebijakan IPAL berdasarkan kondisi lingkungan di wilayahnya b. Bagaimana bentuk koordinasi kelurahan dengan Dinperkim LH dalam memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan c. Apakah terdapat penurunan pencemaran air atau peningkatan kebersihan lingkungan setelah IPAL beroperasi d. Apakah IPAL batik ini telah membantu mengurangi pencemaran dari limbah usaha batik e. Apakah seluruh pelaku usaha batik rutin menyalurkan limbahnya ke IPAL sesuai ketentuan? Jika tidak, apa kendalanya f. Apakah masyarakat merasakan perubahan kondisi lingkungan seperti warna air,

		<p>bau, atau kebersihan sungai setelah IPAL dibangun</p> <p>g. Apakah ada data atau indikator tertentu yang digunakan untuk menilai keberhasilan yang dimiliki Dinperkim LH</p> <p>h. Bagaimana koordinasi Dinperkim LH dengan Pemerintah Kelurahan Simbangkulon untuk memantau kepatuhan pelaku usaha</p>
Efisiensi	Menilai sejauh mana sumber daya seperti dana, tenaga, dan waktu digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.	<p>a. Menurut Kelurahan Simbangkulon, apakah hasil IPAL sebanding dengan biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan</p> <p>b. Bagaimana Kelurahan Simbangkulon berkoordinasi dengan Dinperkim LH dalam memastikan tenaga, dana, dan waktu kegiatan IPAL digunakan secara optimal</p> <p>c. Apakah prosedur pembuangan IPAL, cukup mudah atau justru menghambat proses produksi</p> <p>d. Apakah prosedur pembuangan IPAL, cukup mudah atau justru menghambat proses produksi</p> <p>e. Apakah dalam pengelolaan IPAL ini terdapat iuran yang dibebankan kepada pelaku usaha, bagaimana tanggapannya? Dan apakah sebanding dengan manfaatnya</p> <p>f. Apakah masyarakat menilai kebijakan IPAL memanfaatkan dana publik secara efisien dalam mengatasi pencemaran lingkungan</p> <p>g. Bagaimana Dinperkim LH memastikan penggunaan</p>

		dana, tenaga, dan waktu dalam program IPAL dilakukan secara efisien dan tepat sasaran? Dan apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh dari IPAL
Kecukupan	Menilai sejauh mana hasil kebijakan sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.	<p>a. Apakah fasilitas pengelolaan limbah yang ada di Simbangkulon sudah memadai bagi seluruh pelaku usaha batik</p> <p>b. Apakah kapasitas IPAL ini mencukupi untuk menampung limbah dari seluruh pelaku usaha batik</p> <p>c. Apakah masyarakat menilai keberadaan IPAL sudah cukup untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar</p> <p>d. Apakah kapasitas IPAL saat ini cukup untuk menampung seluruh limbah dari industri batik di Simbangkulon</p>
Perataan	Menganalisis sejauh mana manfaat kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak terkait.	<p>a. Apakah manfaat dari kebijakan IPAL ini sudah dirasakan merata oleh masyarakat dan seluruh pengusaha batik</p> <p>b. Apakah semua pelaku usaha batik di Simbangkulon dapat menggunakan IPAL tanpa hambatan</p> <p>c. Apakah masyarakat merasa dilibatkan secara adil dalam kegiatan atau pengawasan IPAL</p> <p>d. Bagaimana Dinperkim LH memastikan distribusi manfaat kebijakan IPAL berlangsung adil dan dapat dikonfirmasi oleh pemerintah kelurahan</p>
Responsivitas	Menilai kemampuan kebijakan dalam menanggapi kebutuhan,	a. Bagaimana Pemerintah Kelurahan Simbangkulon

	aspirasi, dan keluhan masyarakat.	<p>menyalurkan keluhan masyarakat kepada Dinperkim LH? Dan bagaimana respon dari pihak terkait</p> <p>b. Apakah pemerintah cepat tanggap terhadap kendala teknis atau kebutuhan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah</p> <p>c. Apakah anda merasa pemerintah tanggap terhadap masalah lingkungan di sekitar area produksi batik dan apakah masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan terkait kebijakan IPAL</p> <p>d. Bagaimana Dinperkim LH menanggapi keluhan atau masukan masyarakat terkait dampak lingkungan akibat limbah batik</p>
Ketepatan	Mengukur kesesuaian kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan ril permasalahan.	<p>a. Menurut Pemerintah Kelurahan Simbangkulon dalam menilai kebijakan ipal ini apakah tepat sasaran</p> <p>b. Apakah kebijakan IPAL sudah tepat dalam membantu kegiatan produksi tanpa menghambat usaha pelaku batik</p> <p>c. Menurut anda apakah kebijakan IPAL ini sudah tepat sasaran dalam mengatasi pencemaran lingkungan di wilayah Simbangkulon</p> <p>d. Apakah kebijakan dan regulasi IPAL sudah sesuai dengan kondisi nyata pencemaran limbah batik di lapangan</p>

Sumber: diolah oleh penulis

**Tabel 1.5 Alur Pemikiran**

Sumber: diolah oleh penulis

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang difokuskan dan melibatkan interpretasi serta pendekatan alamiah pada topik penelitian. Hal ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari sesuatu dalam lingkungan alamnya, berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena dengan cara yang relevan bagi masyarakatnya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kehidupan pribadi, wawancara, observasi, sejarah, interaksi, dan teks visual yang menunjukkan masalah waktu dan rutinitas (Denzin & S.L., 1994).

Alasan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif sebab permasalahan yang diteliti sangat kompleks dan juga *holistic* serta penuh makna sehingga tidak mungkin dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, penulis juga ingin memahami secara lebih mendalam terkait situasi yang terjadi pada objek penelitian, yaitu dengan menggambarkan dan mendeskripsikan hasil Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah pada Industri Batik di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan.

### **1. 8.2 Situs Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diambil oleh penulis, maka penelitian dilakukan di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan. Kelurahan Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dipilih menjadi lokasi atau wilayah penelitian karena merupakan lokasi pembangunan IPAL Komunal milik Pemerintah Daerah Kabupaten pekalongan yang diharapkan mampu mengendalikan limbah secara kolektif.

### **1. 8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian dalam sebuah studi penelitian. Pada penelitian dengan metode kualitatif subjek penelitian disebut sebagai narasumber atau informan. Narasumber atau informan yaitu individu yang menyampaikan informasi atau tanggapan yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Oleh sebab itu, subjek penelitian ini dapat dicari melalui informasi dari Sudawanto selaku Staf Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, Franky R. Aghatha Franky Irawan selaku Lurah Simbangkulon, Farid, Kholidin Tarsan, dan Uswatun Khasanah selaku pelaku usaha batik di Kelurahan Simbangkulon, serta Hafiz dan Abidin selaku masyarakat non pelaku usaha batik.

### **1. 8.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang

bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis dari suatu fenomena tertentu. Data dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan informan, analisis dokumen yang relevan dengan penelitian, dan gambar. Menurut (Siyoto & Sodik, 2015; 68-69), data penelitian dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Data kualitatif, merupakan data yang terdiri dari kata-kata daripada angka, dan dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam transkrip lapangan.
- b. Data kuantitatif, merupakan data yang didefinisikan sebagai angka atau bilangan. Karena bentuknya dapat diolah atau dipelajari menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

#### **1. 8.5 Sumber Data**

Sumber data merupakan hal yang penting dalam penelitian, sebab keakuratan memilih dan mengidentifikasi sumber data berdampak pada kualitas dan kumpulan data atau informasi yang diperoleh. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian melalui jawaban atas pertanyaan peneliti kepada informan atau narasumber. Dari penelitian ini, data primer diperoleh dari Sudawanto selaku Staf Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, Franky R. Aghatha Franky Irawan selaku Lurah Simbangkulon, Farid, Kholidin Tarsan dan Uswatun Khasanah

selaku pelaku usaha batik, serta Hafiz dan Abidin selaku masyarakat non pelaku usaha.

- b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya atau pengolektifan data oleh peneliti dari berbagai sumber. Data sekunder dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti dokumen (Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah), internet, jurnal, maupun sumber informasi lain yang sesuai dengan penelitian ini.

#### **1. 8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan tahapan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung melalui dialog yang dilakukan oleh dua pihak atau tanya jawab lewat tatap muka antara pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini, wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang tepat karena memperoleh kejelasan informasi yang lebih mendalam terkait Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Batik di Kelurahan Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan. wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu dengan

pemilihan informan atau narasumber sesuai kriteria terdapat 7 informan yang terdiri dari: Sudawanto selaku Staf Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, Franky R. Aghatha Franky Irawan selaku Lurah Simbangkulon, Farid, Kholidin Tarsan dan Uswatun Khasanah selaku pelaku usaha batik, serta Hafiz dan Abidin selaku masyarakat non pelaku usaha.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, pada dasarnya pengambilan data atau informasi yang dikumpulkan melalui dokumen. Penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi untuk mencatat data-data, arsip, dokumen, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Melalui teknik ini, penulis mengumpulkan data dengan mempelajari informasi atau data dari buku, jurnal, situs internet, dan sumber lainnya.

### **1. 8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan proses setelah data terkumpul dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Kegiatan analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mengagregasi data berdasarkan variabel untuk seluruh responden, dan menyajikan data untuk setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan berdasarkan hipotesis yang diajukan. Untuk penelitian yang tidak menghasilkan hipotesis, maka langkah terakhir tidak dilakukan (Sugiyono,

2013:147). Pada penelitian kualitatif, tahapan analisis data dimulai dengan mereduksi data atau mengorganisasikan atau mengelompokkan data mentah ke dalam permasalahan pokok sesuai dengan arah penelitian, hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa data yang sama dapat dikelompokkan menjadi bagian-bagian yang terkait. Data tersebut kemudian disajikan sesuai penelitian. Data ini diperoleh dari ringkasan wawancara dan data lain yang didukung oleh tinjauan pustaka. Dan terakhir penarikan kesimpulan, langkah terakhir analisis data adalah mengambil keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian mulai dari rumusan masalah hingga hasil data yang telah disusun.

#### **1. 8.8 Kualitas Data**

Penelitian dapat memperoleh kualitas data, hal yang dapat dilakukan dengan cara menguji kualitas data dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari bermacam sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013:273). Terdapat 3 macam triangulasi yang dapat digunakan untuk menguji data antara lain, triangulasi sumber (menguji kualitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber); triangulasi teknik (menguji kualitas data dengan cara mengoreksi kembali data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, contohnya data hasil wawancara dikoreksi kembali dengan hasil dokumentasi); triangulasi waktu (menguji kualitas data dengan mengecek hasil wawancara atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, sebab

memungkinkan verifikasi keaslian data melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda. Dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, misalnya, peneliti dapat memastikan konsistensi dan validitas data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang bertujuan untuk melakukan *cross check* atau membandingkan hasil wawancara secara mendalam dengan beberapa narasumber atau informan yang apabila informan atau narasumber berbeda menyatakan hal sama berarti data tersebut dapat dinyatakan valid.